



REFORMASI KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR: ANTARA HARAPAN DAN REALITA DARI K 13 MENUJU KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH MI

Anaphaliza Davi Farhani¹, Naeli Tamami², Nurhidayah Nasution³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Jakarta, Indonesia

Email anaphaliza.davi25@mhs.uinjkt.ac.id



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i3.2745>

Sections Info

Article history:

Submitted: 23 March 2026

Final Revised: 11 April 2026

Accepted: 16 May 2026

Published: 27 June 2026

Keywords:

Curriculum Reform

Merdeka Curriculum

2013 Curriculum

Madrasah Ibtidaiyah



ABSTRACT

Objective: Curriculum reform in Indonesia has shifted significantly from the 2013 Curriculum (K-13) to the Merdeka Curriculum, which aims to provide learning flexibility and character development. However, implementing this conceptual framework creates a gap between expectations and reality in primary education, particularly in Madrasah Ibtidaiyah (MI). This study aims to analyze the challenges and readiness of MI during this curriculum transition. Using a descriptive qualitative approach with a case study design, data were gathered through interviews, observations, and documentation. The results indicate a notable discrepancy between ideal expectations and field realities. While the Merdeka Curriculum is expected to reduce administrative burdens and center on students, MI teachers face major obstacles. These include limited formal training, difficulties in designing differentiated lesson plans, and adaptation challenges with digital grading applications. This study concludes that the transition from K-13 to the Merdeka Curriculum in MI is still in a challenging phase that requires intensive assistance and sustainable guidance rather than a simple administrative change.

ABSTRAK

Objektif: Reformasi kurikulum di Indonesia telah bergeser secara signifikan dari Kurikulum 2013 (K-13) ke Kurikulum Merdeka, yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pembelajaran dan pengembangan karakter. Namun, penerapan kerangka konseptual ini menciptakan kesenjangan antara harapan dan realita pada pendidikan dasar, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah (MI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan kesiapan MI selama masa transisi kurikulum tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang nyata antara ekspektasi ideal dan realita di lapangan. Meskipun Kurikulum Merdeka diharapkan dapat mengurangi beban administrasi dan berpusat pada siswa, para guru MI menghadapi hambatan besar. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan pelatihan formal, kesulitan dalam merancang rencana pembelajaran berdiferensiasi, serta tantangan adaptasi dengan aplikasi penilaian digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi dari K-13 ke Kurikulum Merdeka di MI masih berada dalam fase menantang yang memerlukan pendampingan intensif dan bimbingan berkelanjutan, bukan sekadar perubahan administratif biasa.

Kata kunci: Reformasi Kurikulum, Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013, Madrasah Ibtidaiyah.

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di Indonesia terus berubah seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan sebagai bentuk upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Satu diantara langkah strategis tersebut ialah yang dilakukan pemerintah terbaru adalah mengubah kurikulum nasional, yaitu beralih dari Kurikulum 2013 (K-13) ke Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini dibuat sebagai tanggapan atas terjadinya penurunan kemampuan belajar dan juga untuk mengurangi beban tugas belajar yang ada. Kurikulum Merdeka mengedepankan konsep esensialitas, memberi ruang lebih luas dalam pengajaran, serta fokus pada pengembangan karakter siswa. Hal ini direalisasikan dengan penerapan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil Alamin (P5RA). Dengan desain ini, harapan utamanya adalah membentuk lingkungan belajar yang lebih fleksibel, berorientasi pada siswa, serta menyediakan kebebasan bagi para pendidik supaya bisa mengembangkan kemampuannya dalam pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif.

Namun, ketika konsep yang ideal tersebut diaplikasikan dalam praktik sehari-hari di tingkat pendidikan dasar, terutama di Madrasah Ibtidaiyah (MI), muncul berbagai ketidaksesuaian yang sangat jelas antara harapan dari aturan dan kondisi sebenarnya di lapangan. Termasuk dalam lembaga pendidikan dasar dengan ciri khas berupa ajaran Islam, MI berada di bawah pengawasan Kementerian Agama dan menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat. Selain harus menyelaraskan materi lokal keagamaan dengan struktur kurikulum yang baru, madrasah juga menghadapi masalah mengenai kesiapan tenaga manusianya. Banyak guru di tingkat MI belum pernah menerima pelatihan dan pembekalan resmi yang menyeluruh mengenai cara menerapkan kurikulum baru ini.

Di lapangan, kenyataannya menunjukkan bahwa kebanyakan guru MI masih menghadapi kesulitan besar dalam membuat perangkat pembelajaran mandiri, seperti Modul Ajar, serta dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa membantu memenuhi kebutuhan dan keunikan setiap siswa. Beban administrasi yang seharusnya berkurang justru berubah menjadi bentuk kebingungan baru, terutama dalam mengisi aplikasi penilaian digital seperti Rapor Digital Madrasah (RDM). Kondisi ini semakin sulit karena perbedaan akses fasilitas pendukung antar madrasah, di mana beberapa MI, khususnya yang berstatus swasta, masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh sarana literasi digital dan buku panduan yang cukup.

Kesenjangan antara aturan yang semakin maju dan kesiapan dari tingkat dasar yang masih berubah-ubah inilah yang menjadi alasan utama mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Diperlukan analisis yang mendalam agar dapat menggambarkan secara nyata proses perpindahan dari K-13 ke Kurikulum Merdeka di MI, sehingga dapat mengidentifikasi hambatan yang nyata dan menemukan alternatif solusi bagi para pelaku kebijakan. Maka karena itu, ditujukannya penelitian ini ialah guna mempelajari secara mendetail hubungan antara harapan yang ada dalam Kurikulum Merdeka dan kondisi nyata saat kurikulum tersebut diterapkan di institusi Madrasah Ibtidaiyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode studi kepustakaan (*literature review*) beserta pendekatan deskriptif kualitatif guna menganalisis kesenjangan transisi Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah (MI). Data sekunder dihimpun dari artikel jurnal ilmiah, prosiding, buku teks, dan regulasi resmi kementerian terkait melalui basis data *Google Scholar*, Sinta, dan Garuda. Kata kunci yang dicari dalam penelusuran meliputi "implementasi Kurikulum Merdeka MI", "hambatan guru madrasah", dan "transformasi K-13

menuju Kurikulum Merdeka". Teknik dokumentasi diterapkan untuk mengumpulkan literatur mutakhir, yang kemudian diseleksi melalui tahap reduksi data. Kemudian, analisis data bisa dilaksanakan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) secara kritis dan komparatif sebelum ditarik kesimpulan secara logis untuk menyajikan sintesis yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian reformasi kurikulum pendidikan

Reformasi bermakna sebagai perubahan yang drastis, beberapa ahli juga menyebutkan terkait reformasi ialah proses terbentuknya kembali suatu tatanan hidup (pergantian antara tata kehidupan yang lama dengan yang baru). Reformasi dalam bidang pendidikan dimaksudkan agar pendidikan dapat terus berkembang dan berubah menjadi lebih baik lagi sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Selaras dengan yang dikatakan oleh Slameto (2019) bahwa sektor pendidikan sebagai sarana bangsa untuk melatih, membina, mempersiapkan, serta mewujudkan generasi siswa yang berkualitas sebagai pemimpin generasi bangsa ke masa depan yang tidak diketahui tetapi menggairahkan. Reformasi juga dapat disebut sebagai upaya pembaharuan (modernisasi), maka dari itu, reformasi pendidikan bisa diartikan sebagai usaha untuk memperbaiki sesuatu dengan menyempurnakan sejumlah hal yang kurang dan sudah ada sebelumnya. Berdasarkan deskripsi sebelumnya, bisa diketahui tentang reformasi yakni proses memperbaiki yang dilaksanakan secara keseluruhan sistem di bidang manapun, seperti halnya sosial, politik, ekonomi, hingga pendidikan (Pendidikan et al., n.d.). Secara etimologis, reformasi merujuk pada upaya rekonstruksi atau penataan ulang terhadap suatu kondisi yang tidak teratur melalui tindakan korektif, seperti menambah, mengganti, mengurangi, hingga memperbaiki sistem yang ada. Dalam konteks historis di Indonesia, istilah ini mengalami penyempitan makna yang khas, yaitu merujuk pada periodisasi politik pasca-runtuhnya rezim Orde Baru di tahun 1998 akibat desakan gerakan massa yang masif. Rentang waktu sejak tumbangnya Orde Baru hingga saat ini kemudian dikenal secara luas sebagai Era Reformasi. Konteks kronologis ini penting untuk menggarisbawahi bahwa setiap perubahan regulasi maupun tatanan institusional yang lahir dalam era ini membawa spirit pembaruan dari ambruknya sistem masa lalu (Ikhwan STAI Muhammadiyah Tulungagung, n.d.). Sebagai sebuah proses yang kompleks, multidimensional, dan saling berkait kelindan, reformasi pendidikan menuntut perencanaan matang dalam linimasa yang panjang. Kompleksitas ini terlihat dari durasi implementasinya yang jauh lebih lama dibandingkan dengan reformasi sektor ekonomi maupun politik. Karakteristik ini tercermin dalam sebuah seminar pasca-runtuhnya Tembok Berlin di Jerman Timur, yang mengestimasi bahwa reformasi politik hanya membutuhkan waktu enam bulan dan reformasi ekonomi memerlukan enam tahun, sementara reformasi pendidikan setidaknya membutuhkan waktu hingga enam puluh tahun. Walaupun memakan waktu yang panjang, akuntabilitas hasil pada setiap fase reformasi pendidikan tetap harus dipenuhi. Selain itu, poin krusial dari transformasi ini adalah pentingnya menyediakan ruang gerak (*room for manoeuvre*) bagi para praktisi pendidikan untuk menelurkan inovasi baru demi peningkatan mutu secara berkelanjutan (Pondasi & Zamroni, n.d.).

2. Konsep dan Karakteristik Kurikulum 2013 (K13)

a. konsep kurikulum 2013 (k13)

Kurikulum 2013 (Kurtilas) termasuk kurikulum berbasis kompetensi yang diberlakukan pada tahun ajaran 2013/2014 untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya dalam menjawab tantangan modern. Kebijakan ini berorientasi membentuk generasi dengan inovatif, kreatif, aktif, produktif, juga afektif melalui penyelarasan aspek pengetahuan, keterampilan, serta

karakter.

Untuk mencapai target tersebut, semua mata pelajaran, yang salah satunya juga ialah Pendidikan Agama Islam (PAI)—wajib mengintegrasikan pendekatan saintifik melalui metode berbasis observasi (*mengamati, menanya, menalar, dan mencoba*) demi menstimulasi kreativitas siswa. Sementara pada sistem evaluasi, Kurtilas menerapkan model penilaian autentik yang mengukur ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara komprehensif lewat instrumen ulangan, ujian, maupun portofolio. Kurikulum ini juga mengontekstualisasikan nilai-nilai Islam ke dalam prinsip universal yang adaptif.

Secara tata laksana, Kurtilas membagi kompetensi ke dalam dimensi sosial, religius, pengetahuan, dan keterampilan melalui struktur Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang diaplikasikan secara integratif di kelas. Dalam perkembangannya, kurikulum ini disempurnakan agar selaras dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) terkait standar isi, proses, penilaian, dan SKL. Meskipun sempat muncul istilah Kurikulum Nasional (Kurnas) pada masa transisi, regulasi pusat akhirnya resmi menetapkan dengan nomenklatur Kurikulum 2013 Edisi Revisi (Azizah et al., 2024).

Dinamika ini menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 (Kurtilas) sejatinya dirancang secara fleksibel serta adaptif dalam merespons tuntutan mutu pendidikan. Melalui rekonstruksi menyeluruh pada berbagai standar baku, Kurtilas mengusung paradigma pembelajaran yang sistemik. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan implementasinya tidak dapat dinilai secara parsial, melainkan harus diukur dari konsistensi pendidik dalam mengaktualisasikan seluruh elemen standar tersebut ke dalam aktivitas instruksional sehari-hari.

Secara filosofis, Kurikulum 2013 bertujuan mencetak generasi bangsa yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif agar mampu berkontribusi aktif dalam ranah sosial hingga peradaban global. Fokus kurikulum ini diarahkan pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik melalui unifikasi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Melalui pendekatan integratif tersebut, sistem pembelajaran diharapkan mampu menghasilkan output yang bermutu dan berkarakter, di mana siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konseptual mereka secara nyata dalam konteks kehidupan sehari-hari (PEMIKIRAN_PENDIDIKAN_KI_HAJAR_DEWANTARA, n.d.).

b. karakteristik kurikulum 2013 (13)

Kurikulum 2013 didesain sebagai kurikulum yang menitikberatkan pada pengembangan karakter serta kemampuan implementasi kompetensi spesifik agar memberikan dampak nyata bagi siswa. Kurikulum ini menerapkan konsep terintegrasi yang memadukan berbagai keterampilan, tema, konsep, dan topik secara holistik. Dengan demikian, esensi utama dari Kurikulum 2013 adalah terciptanya keseimbangan (*balance*) antara ranah sikap (*attitude*), keterampilan (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*). Seluruh aspek tersebut diintegrasikan sebagai pedoman pembelajaran guna membuat kualitas pengajaran dan hasil belajar yang diperoleh bisa meningkat yang bersumber dari pembentukan watak peserta didik secara utuh (Setiawan & Syifa'ul Fuadiyah Ahla, 2022), penyelarasan dimensi karakter dan kapasitas personal secara utuh dalam Kurikulum 2013 bertindak sebagai pilar utama transformasi edukasi di tanah air. Sifatnya yang terpadu (*integrative*) sukses mengikis metode pembelajaran usang yang didominasi oleh hafalan akademis, lalu menggantinya dengan pengalaman belajar yang lebih kontekstual. Walaupun tata kelola pendidikan saat ini sedang bergerak menuju kurikulum baru, esensi dari penyatuan aspek sikap, keahlian, serta wawasan yang diperkenalkan oleh Kurikulum 2013 dinilai akan selalu menjadi fondasi baku yang tidak boleh diabaikan demi melahirkan lulusan yang cakap menghadapi perubahan zaman.

3. Konsep dan Karakteristik Kurikulum Merdeka

a. konsep kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka hadir sebagai bentuk penyempurnaan dari Kurikulum 2013 yang diresmikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kurikulum ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia melalui sistem pembelajaran intrakurikuler yang lebih variatif. Dalam penerapannya, Kurikulum Merdeka menitikberatkan pada terciptanya ekosistem belajar yang aktif, mandiri, nyaman, bermakna, serta berbasis penguatan karakter. Pendidik diberikan otoritas penuh untuk memilih dan menentukan media ajar yang relevan dengan minat sekaligus kebutuhan belajar peserta didik. Di bawah semboyan "Merdeka Belajar, Guru Bergerak", konsep ini mengusung beberapa arah kebijakan baru, seperti pengalihan wewenang kelulusan sekolah dari USBN ke pihak sekolah, ketika terjadi transmisi dari Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, efisiensi administrasi melalui penyederhanaan RPP, serta penerapan sistem zonasi dalam PPDB dengan pengecualian bagi wilayah 3T. ngkat dan jelas deskripsikan hasil yang didapatkan serta disertai dengan penjelasan yang menguraikan tentang hasil yang telah diperoleh dengan teori pendukung yang digunakan(241-471-1-SM, n.d.).

Secara konseptual, struktur Kurikulum Merdeka diorganisasikan ke dalam tiga jenis aktivitas pembelajaran utama. Pertama, pembelajaran intrakurikuler yang diimplementasikan melalui pendekatan terdiferensiasi, sehingga memberikan ruang bagi siswa guna menyelami konsep materi secara optimal sekaligus memberikan fleksibilitas bagi pendidik dalam menentukan perangkat ajar yang relevan dengan karakteristik kelas. Kedua, pembelajaran kokurikuler yang dapat terwujud melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yang mana aktivitas interdisipliner ini difokuskan pada penanaman karakter dan kompetensi umum siswa. Ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler yang diselenggarakan secara fleksibel guna memfasilitasi minat peserta didik dengan menyesuaikan ketersediaan sumber daya di masing-masing satuan pendidikan(Abdul Fattah Nasution et al., 2023).

b. Karakteristik Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka diciptakan secara khusus sebagai solusi guna mengatasi kemunduran akademis (*learning loss*). Upaya pemulihan ini bertumpu pada tiga pilar utama berikut:

1) Pembelajaran Berbasis Projek (PjBL) Berorientasi Profil Pelajar Pancasila Pengembangan *soft skills* dan karakter murid yang selaras dengan Standar Kompetensi Lulusan diakomodasi melalui kegiatan kokurikuler berupa P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila). Program ini dijalankan secara terpisah dari jam pelajaran biasa (intrakurikuler) dengan mengutamakan pengalaman nyata (*experiential learning*) serta pendekatan konstruktivisme yang kontekstual. Dalam penerapannya, guru memandu siswa melalui enam tahapan (sintaks) PjBL secara berurutan, yang dimulai dari penentuan pertanyaan mendasar, penyusunan desain perencanaan proyek, penjadwalan pelaksanaan, pemantauan kemajuan proyek, pengujian hasil akhir, hingga diakhiri dengan evaluasi pengalaman belajar.

Merujuk pada SK Kepala BSKAP No. 009 Tahun 2022, proyek ini menyasar enam dimensi kompetensi kunci, yaitu: beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia, mandiri, bergotong-royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Khusus pada jenjang Sekolah Dasar (SD), target capaian tersebut dipetakan ke dalam tiga fase perkembangan usia, diantaranya ialah **Fase A** (kelas 1–2 SD), **Fase B** (kelas 3–4 SD), dan **Fase C** (kelas 5–6 SD).

2) Orientasi Kompetensi Melalui Fokus Materi Esensial Kurikulum ini mengedepankan efisiensi dan efektivitas melalui sistem pembelajaran berbasis kompetensi yang dipusatkan pada siswa yang diajar (*student-centered*), di mana guru bertindak sebagai fasilitator dan

penilaian diukur dari performa individu. Pembatasan materi hanya pada hal-hal yang krusial (esensial) memberikan ruang waktu yang memadai bagi siswa untuk mengeksplorasi ilmu secara mendalam, kreatif, dan inovatif. Target utama dari penyederhanaan materi ini adalah penguatan kemampuan fondasi dasar berupa **literasi** (kemampuan mengolah informasi) dan **numerasi** (penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari).

3) Fleksibilitas Pembelajaran Berdiferensiasi Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas penuh bagi pendidik untuk menyelaraskan materi ajar dengan konteks lokal sekaligus kebutuhan individu siswa. Guru difasilitasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuan dan minatnya tanpa merasa tertekan. Dalam implementasinya di kelas, guru memiliki otoritas penuh untuk memodifikasi empat aspek diferensiasi, yaitu: **konten** (menyesuaikan materi atau bahan yang diajarkan), **proses** (menyesuaikan strategi atau cara siswa memahami materi), **produk** (memvariasikan bentuk tugas akhir atau demonstrasi hasil belajar), serta **lingkungan belajar** (mengondisikan suasana, iklim, dan tata ruang kelas agar kondusif)(Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka Belajar et al., n.d.)

4. Perbedaan K13 dan Kurikulum Merdeka

Pergeseran dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka membawa transformasi besar dalam dunia pendidikan Indonesia, meski keduanya tetap setia pada koridor Sistem Pendidikan Nasional. Pada Kurikulum 2013, fokus kompetensi dijabarkan secara kaku lewat Kompetensi Dasar (KD) dengan mengacu pada empat Kompetensi Inti (KI), di mana aspek spiritual dan sosial dikhususkan untuk mapel Agama dan PPKn. Proses belajarnya pun seragam menggunakan pendekatan saintifik yang berpusat pada jam tatap muka. Dari sisi evaluasi, K13 memisahkan nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui ujian formatif dan sumatif dengan dukungan utama berupa buku teks resmi.

Arah baru dihadirkan oleh Kurikulum Merdeka. Alih-alih menggunakan poin-poin KD, kurikulum ini menyatukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam satu narasi paragraf disebut Capaian Pembelajaran (CP) berbasis fase, demi mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Sistem belajarnya pun lebih dinamis karena memisahkan sesi kelas (intrakurikuler) dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) lewat pengaturan waktu tahunan yang fleksibel. Menariknya, Kurikulum Merdeka menghapus KKM dan sekat pemisah antar-aspek penilaian. Penilaian formatif kini menjadi kompas untuk menyusun strategi belajar yang sesuai dengan level siswa. Guru pun dibekali perangkat yang lebih variatif, seperti modul ajar, Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), hingga panduan kurikulum operasional sekolah(Pendidikan & Konseling, n.d.). Dari aspek manajemen waktu, Kurikulum 2013 menetapkan alokasi jam pelajaran secara mingguan dengan menitikberatkan pada pendekatan tematik integratif. Sebaliknya, Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk mengelola waktu belajar melalui sistem jam pelajaran tahunan yang diintegrasikan bersama proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila(Pratycia et al., 2023).

5. Harapan Penerapan Kurikulum Merdeka di MI

Kehadiran Kurikulum Merdeka di jenjang MI membawa angin segar karena menawarkan sistem belajar yang jauh lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan anak zaman sekarang. Di sini, guru tidak lagi dikekang oleh aturan kaku dan punya kebebasan penuh untuk berkreasi dalam mengajar. Dampaknya, ruang kelas menjadi tempat untuk mengasah keterampilan penting masa kini seperti cara berpikir kritis, kreativitas, dan kerja sama tim, bukan cuma tempat mengejar nilai akademik. Melalui penguatan nilai P5RA, kurikulum ini menaruh harapan besar agar siswa MI tumbuh menjadi pribadi yang dengan perilaku yang baik dan mampu bersaing di masa mendatang(Suryadi et al., n.d.).

6. Realita dan Kendala Implementasi kurikulum Merdeka Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di lingkungan satuan pendidikan masih membentur serangkaian eksistensi tantangan, khususnya pada ranah aktivitas intrakurikuler. Kendala fundamental berakar dari keterbatasan persepsi dan pemahaman esensial para pendidik mengenai konsep serta aplikasi kurikulum baru ini secara komprehensif. Beban kerja guru yang eskalatif, keterbatasan alokasi waktu, serta minimnya fasilitas penunjang turut memperparah kondisi di lapangan. Akibatnya, iklim pembelajaran yang berbasis pada keaktifan, kreativitas, dan rekreatif belum mampu diaktualisasikan secara maksimal.

Pada tataran praktis, disparitas kompetensi kompetitif peserta didik juga menjadi variabel penghambat tersendiri. Di jenjang kelas rendah, fenomena belum lancarnya kemampuan membaca dan berhitung masih jamak ditemukan. Sebaliknya pada jenjang kelas tinggi, isu yang mengemuka adalah rendahnya tingkat konsentrasi belajar siswa. Dinamika ini memengaruhi stabilitas suasana kelas, sehingga menuntut perhatian dan pendampingan yang lebih terfokus dari guru demi menjaga efisiensi instruksional.

Kontras dengan lini intrakurikuler, aktivitas ekstrakurikuler berbasis non-akademis justru menunjukkan progres adaptasi yang relatif lebih adaptif, seperti pada kegiatan kepanduan maupun seni musik keagamaan. Kendati demikian, program pengayaan yang beririsan dengan kemampuan literasi dan numerasi dasar masih menemui hambatan, terutama pada siswa tahun pertama. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa peserta didik lebih responsif dan cepat menyesuaikan diri pada domain non-akademis ketimbang materi kurikuler formal.

Di sisi lain, pilar Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tidak luput dari kendala operasional, yang didominasi oleh keterbatasan pembiayaan, minimnya literasi guru mengenai metodologi proyek, serta kesenjangan latar belakang ekonomi keluarga siswa. Walaupun dihadapkan pada restriksi tersebut, secara umum partisipasi aktif peserta didik dalam mengikuti alur proyek P5 dinilai cukup baik dan minim resistensi. Secara makro, realitas ini menegaskan bahwa tingkat keberhasilan transformasi kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh variabel kesiapan pendidik, kecukupan infrastruktur, kompetensi awal siswa, serta sokongan finansial dan sosiologis ekosistem sekolah (Tisna et al., 2025).

7. Dampak Perubahan Kurikulum terhadap Guru dan Siswa

Setiap perubahan kebijakan pendidikan pasti memengaruhi profesionalisme guru, khususnya karena adanya tuntutan untuk beradaptasi dengan pendekatan baru serta penyesuaian beban kerja mereka. Dinamika ini menciptakan pengertian tertentu di kalangan para guru, yang kemudian akan terlihat langsung dalam cara mereka mengajar di dalam kelas. Menurut teori Philip Kotler (1997), persepsi adalah proses mengumpulkan, mengelompokkan, dan memahami informasi hingga terbentuk menjadi suatu pemahaman yang bermakna.

Beberapa guru melihat kurikulum baru sebagai kesempatan bagus untuk berinovasi, membuat pembelajaran yang lebih berfokus pada siswa, serta menggunakan teknologi dengan cara yang kreatif melalui berbagai proyek. Guru-guru yang memiliki pikiran terbuka biasanya senang mengikuti pelatihan agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, tantangan seperti kesulitan memahami sistem dan kurangnya petunjuk teknis yang jelas sering kali membuat para guru merasa cemas dan malas untuk berubah. Pendidik yang belum siap sering kali memilih jalan yang aman dengan tetap menggunakan metode lama.

Akhirnya, pendapat para guru terhadap perubahan kurikulum ini membagi menjadi dua jenis respons, yaitu positif dan negatif. Karena persepsi seseorang bisa terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal seperti yang dijelaskan oleh Shambodo, maka faktor kesiapan dan stimulasi bantuan memiliki peran yang sangat penting. Guru yang sudah mengikuti pelatihan yang

cukup dan memiliki fasilitas yang memadai akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Sebaliknya, jika tidak ada dukungan dan bimbingan yang nyata, kemungkinan besar para guru akan lebih sulit menerima dan mengadopsi perubahan tersebut (Indriani & Marno, 2024).

Kebijakan pengaturan kurikulum yang sering diubah sering kali menyebabkan dampak psikologis dan akademis pada siswa. Proses peralihan yang cukup singkat memaksa siswa untuk beradaptasi secara cepat, dan jika tidak ditangani dengan baik, bisa mengurangi kualitas belajar serta menurunkan hasil akademik mereka. Secara teoretis, kurikulum yang diterapkan dengan baik berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan semangat juga keaktifan belajar siswa saat proses pembelajaran. Namun, penerapan yang terlalu cepat dapat membuat siswa bingung dalam memahami materi penting yang seharusnya mereka ketahui.

Meski begitu, konsep Merdeka Belajar memberikan dampak positif bagi kemandirian belajar siswa. Kurikulum baru ini diinspirasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang menyediakan ruang bebas bagi siswa untuk menjelajahi pengetahuan yang cocok dengan bakat, kegemaran, dan sifat pribadi mereka. Siswa kini tidak lagi dianggap sebagai objek yang hanya menerima materi passif, tetapi dianggap sebagai subjek yang aktif dan potensinya didukung secara manusiawi oleh guru. Oleh karena itu, penting dilakukan pengecekan secara menyeluruh mengenai dampak perpindahan kurikulum ini agar dapat dipahami lebih dalam, sehingga hak belajar setiap siswa dapat terpenuhi secara optimal (Sari, 2024).

8. Solusi dan Strategi Mengatasi Kendala Implementasi

Berbagai masalah yang muncul saat menerapkan Kurikulum Merdeka membutuhkan penyelesaian yang menyeluruh agar tujuan dan misi pendidikan bisa tercapai dengan baik. Karena adanya keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan dana BOS atau BOSDA untuk sekolah-sekolah negeri. Sementara itu, bagi institusi swasta, aspek pembiayaan ini bisa diintegrasikan ke dalam dana registrasi peserta didik baru di awal tahun ajaran. Selain itu, diperlukan solusi berupa kerja sama yang aktif mulai dari sekolah, orang tua, hingga dinas pendidikan setempat supaya pembelajaran berbasis proyek bisa berlangsung tanpa ada hambatan. Kerja sama dan bantuan dari semua pihak terkait serta lembaga yang terlibat memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan kurikulum secara merata.

Di sisi lain, tantangan terkait kesiapan para tenaga pendidik dan kependidikan juga perlu mendapat perhatian yang serius. Masalah pembelajaran yang terjadi karena kurangnya kemampuan guru merupakan hambatan yang perlu segera dicari solusinya agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. Sebagai solusi, para guru dianjurkan untuk aktif mengikuti berbagai lokakarya dan pelatihan agar meningkatkan kemampuan serta mendapatkan informasi terbaru mengenai Kurikulum Merdeka. Sekolah dan pemerintah juga diharapkan lebih maju dalam mengadakan forum pelatihan yang membantu meningkatkan pengetahuan para guru. Cara ini bisa lebih baik lagi dengan membuat komite pembelajar di dalam sekolah dan terus mengikuti workshop secara berkala (Khoirin Nisa' et al., 2023). Lebih lanjut dalam aspek teknis, di lapangan para guru seringkali mendapat beberapa masalah atau tantangan dalam pembuatan modul ajar. Hambatan ini terjadi karena kurangnya referensi yang sesuai dengan konteks nyata, sehingga sulit diadaptasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap lembaga pendidikan, terutama dalam penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP). Selain itu, perubahan fokus penilaian yang saat ini menekankan pada penilaian formatif dan autentik yang masih belum dikuasai secara menyeluruh oleh beberapa guru. Banyak guru masih mengikuti cara penilaian lama yang lebih memperhatikan angka-angka, daripada mengamati perkembangan kemampuan siswa secara

menyeluruh. Fenomena yang sama juga terjadi dalam pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), di mana pemahaman para guru dalam merancang, menguji, dan mengevaluasi program tersebut masih kurang memadai. Akibatnya, inti dari P5 sering kali hanya fokus pada hal-hal yang berupa upacara semata, tanpa mampu menyelaraskan nilai-nilai karakter yang seharusnya dipegang. Realitas ini menunjukkan bahwa diperlukan pengawasan dan bimbingan yang lebih intens dari Dinas Pendidikan serta para fasilitator yang berkompeten. Kesuksesan perubahan kurikulum ini pada akhirnya sangat tergantung pada kerja sama yang baik antara guru dan kepala sekolah dalam merancang strategi pembelajaran. Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki visi jelas dan mampu beradaptasi terbukti bisa mendorong kreativitas dan sikap proaktif para guru. Sebaliknya, tata kelola kepemimpinan yang tidak aktif akan menyebabkan para pendidik bekerja tanpa ada koordinasi dan arah yang jelas. Maka karena itu, peningkatan kemampuan kepala sekolah selaku penggerak dalam sekolah menjadi faktor penting untuk mendorong seluruh sistem sekolah. Dari perspektif siswa, keharusan untuk aktif dalam proses belajar sering kali bertabrakan dengan kebiasaan lama mereka yang biasanya lebih pasif dan mengandalkan petunjuk dari guru. Rekonstruksi budaya belajar ini butuh waktu transisi, pendekatan metode yang tepat, serta suasana kelas yang ramah dan inklusif. Selain itu, mengatur waktu menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam mencocokkan pemenuhan materi penting dengan kegiatan proyek P5 yang memakan banyak waktu dalam kelas. Untuk mencegah adanya tumpang tindih dalam jadwal, sinkronisasi antara pembelajaran biasa dan proyek P5 menjadi solusi yang strategis agar kedua kegiatan tersebut berjalan lancar dan selaras. Akhirnya, keberhasilan Kurikulum Merdeka bergantung pada kerja sama dari beberapa pihak, seperti guru, kepala sekolah, orang tua, pemerintah daerah, hingga masyarakat, untuk menciptakan suasana belajar yang bermakna, ramah, dan memberi kemerdekaan kepada para siswa (Kendala+Dan+Solusi+Dari+Implementasi+Kurikulum+Merdeka+Di+SDN+Alalak+Tengah+4, n.d.)

KESIMPULAN

Transformasi sistem pendidikan di Indonesia melalui transisi Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada murid. Melalui Capaian Pembelajaran (CP) berbasis fase yang fokus pada materi esensial, literasi, numerasi, serta metode berdiferensiasi dan proyek P5, kurikulum ini berupaya membangun karakter anak didik secara menyeluruh. Kendati demikian, penerapannya di tingkat sekolah dasar masih terkendala oleh rendahnya pemahaman guru terkait administrasi dan asesmen, keterbatasan fasilitas, serta ketimpangan kemampuan awal siswa. Kondisi ini memicu dilema psikologis pada tenaga pendidik, antara semangat berinovasi dan kecemasan terhadap perubahan. Guna mengatasinya, diperlukan langkah strategis yang terpadu, mulai dari efisiensi anggaran, pengawasan dinas, pelatihan guru yang konsisten, hingga manajemen kepala sekolah yang adaptif melalui kolaborasi harmonis semua pihak.

REFERENSI

241-471-1-SM. (n.d.).

Abdul Fattah Nasution, Setia Ningsih, Mona Febrica Silva, Leli Suharti, & Jekson Parulian Harahap. (2023). Konsep Dan Implementasi Kurikulum Merdeka. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(3), 201–211. <https://doi.org/10.58355/competitive.v2i3.37>

Azizah, N., Sukrina, A., Ridwan Efendi, M., Agama Islam, P., Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,

- F., Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, U. M., & Artikel Kata Kunci, I. (2024). Perbandingan Konsep Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka. In | *ANTHOR: Education and Learning Journal* (Vol. 3).
- Ikhwan STAI Muhammadiyah Tulungagung, A. (n.d.). *Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi*. Retrieved <http://hunafa.stain-palu.ac.id/wp-content/uploads/Sulaiman-Ibrahim81->
- Indriani, S. M., & Marno, M. (2024). Dampak Perubahan Kebijakan Kurikulum terhadap Guru. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 6(1), 539–549. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.6379>
- Kendala+Dan+Solusi+Dari+Implementasi+Kurikulum+Merdeka+Di+SDN+Alalak+Tengah+4. (n.d.).
- Khoirin Nisa', S., Yoenanto, N. H., Ainy, N., & Nawangsari, F. (2023). Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Sekolah Dasar: Sebuah Kajian Literatur. In *Jurnal Kependidikan* (Vol. 12, Number 3). <https://jurnaldidaktika.org>
- Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka Belajar, K., Nafi, J., Jauhari Faruq, D., Mutmainah, S., Wike Widyawati, M., Fiqrizzakiyah, N., Pembelajaran, K., & Merdeka, K. (n.d.). *Auladuna: Jurnal Studi Keislaman KATA KUNCI*. <https://doi.org/10.62097/au.v6i01>
- PEMIKIRAN_PENDIDIKAN_KI_HAJAR_DEWANTARA. (n.d.).
- Pendidikan, J., & Konseling, D. (n.d.). *Analisis Perbedaan Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka* (Vol. 5).
- Pendidikan, J., Pendidikan, R., Sebagai Upaya, I., Transformasi, P., Widya Prastiwi, M., Mustafiah, I., Jalaludin, A. A., Prawesti, G. D., & Lukitoaji, B. D. (n.d.). *BASICA ACADEMICA*. In *Anak Sekolah Dasar* (Vol. 1, Number 1).
- Pondasi, D., & Zamroni, A. (n.d.). *Reformasi Pendidikan*.
- Pratycia, A., Dharma Putra, A., Salsabila, A. G. M., Adha, F. I., & Fuadin, A. (2023). Analisis Perbedaan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 58–64. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1974>
- Sari, Y. (2024). Dampak Perubahan Kebijakan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka Belajar terhadap Guru dan Siswa. 8(5). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i5.8834>
- Setiawan, A., & Syifa'ul Fuadiyah Ahla, S. (2022). Konsep Model Inovasi Kurikulum KBK, KBM, KTSP, K13, dan Kurikulum Merdeka (Literature Review). *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 93–114. <https://doi.org/10.69900/ag.v2i2.80>
- Suryadi, A., Mulyasari, E., Hendriawan, D., & Ulfah, M. (n.d.). *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan Penerapan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar: Tinjauan Literatur Sistematis*.
- Tisna, A. P., Muhaimin, M., & Zumrotun, E. (2025). EFEKTIVITAS MEDIA PLASTISIN DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SENI SISWA SD. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(2), 436–447. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i2.5292>

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:
CC-BY-SA